

Persepsi Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi Pemilu Tahun 2024 di Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Paulus Robert Tuerah¹, Afrinal Afrinal², Kaksim Kaksim³, Rus Yandi⁴, Melvin Hariyanti Gea⁵, Romi Mesra*⁶

^{1,5,6} Universitas Negeri Manado

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³ Universitas PGRI Sumatera Barat

⁴ Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Email: ¹paulustuerah@unima.ac.id, ²afrinalnal67@gmail.com, ³kaksim010983@gmail.com,

⁴rusyandimsi@gmail.com, ⁵20606037@unima.ac.id, ⁶romimesra@unima.ac.id

Diterima	29	Desember	2023
Disetujui	29	Juni	2024
Dipublish	30	Juni	2024

Abstract

This research aims to explore the perceptions of the people of Beringin Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency regarding politics and democracy in the context of the 2024 Election. The research uses a qualitative approach with semi-structured interview methods and participant observation. The sample was selected using a purposive sampling technique to ensure representation of various groups in society. The findings show a skeptical attitude towards excessive political promises, but also a readiness to accept the election results. The community shows critical capacity in evaluating campaign programs, with religious factors and local values still having a significant influence. There is potential for passivity in post-election government supervision, indicating the need for strategies to increase active community participation in the democratic process on an ongoing basis.

Keywords: *Public Perception, Politics and Democracy, 2024 Election*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Desa Beringin, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan terhadap politik dan demokrasi dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipan. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan representasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Temuan menunjukkan adanya sikap skeptis terhadap janji politik yang berlebihan, namun juga kesiapan menerima hasil pemilihan. Masyarakat menunjukkan kapasitas kritis dalam mengevaluasi program kampanye, dengan faktor religius dan nilai lokal masih berpengaruh signifikan. Terdapat potensi pasivitas dalam pengawasan pemerintah pasca pemilihan, mengindikasikan perlunya strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat, Politik dan Demokrasi, Pemilu Tahun 2024*



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat (Mesra, 2023). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara (Daniel et al., 2023). Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan negara (Katili & Latuda, 2022).

Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia (Gugule et al., 2023). Pemilu kali ini akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara serentak. Peristiwa politik lima tahunan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa (Yusrin & Salpina, 2023).

Meski demikian, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pemilu masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian (Gugule & Mesra, 2023). Tingkat partisipasi pemilih, pemahaman terhadap sistem pemilu, serta kepercayaan terhadap proses demokrasi menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemilu (Katili & Latuda, 2022).

Di tingkat desa, dinamika politik dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi memiliki karakteristik yang khas (Mesra et al., 2023). Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran strategis dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi, serta kuatnya

pengaruh elit lokal dapat mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat desa dalam proses demokrasi (Hardinata & Mesra, 2024).

Desa Beringin yang terletak di Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, menjadi salah satu contoh menarik untuk mengkaji persepsi masyarakat desa terhadap politik dan demokrasi menjelang Pemilu 2024. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia timur, Desa Beringin memiliki karakteristik sosial budaya yang unik yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakatnya terhadap proses politik.

Masyarakat Desa Beringin, seperti halnya masyarakat desa lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, kondisi ekonomi, serta pengaruh budaya lokal dapat membentuk persepsi mereka terhadap politik dan pemilu.

Pemahaman terhadap sistem pemilu, proses pencalonan kandidat, serta peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Sejauh mana masyarakat Desa Beringin memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi juga menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi indikator penting. Pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, isu-isu seperti politik uang, serta kinerja wakil-wakil rakyat terpilih dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu.



Peran media, baik media konvensional maupun media sosial, dalam membentuk opini publik juga tidak dapat diabaikan. Di era digital seperti sekarang, masyarakat desa pun mulai terpapar berbagai informasi politik melalui berbagai platform media. Namun, tantangan seperti penyebaran berita palsu dan disinformasi juga menjadi masalah yang perlu diwaspadai.

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pemungutan suara. Keterlibatan dalam diskusi politik, kampanye, hingga pengawasan proses pemilu juga menjadi bentuk partisipasi yang penting. Sejauh mana masyarakat Desa Beringin terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik ini menjadi aspek yang menarik untuk diteliti.

Faktor sosial budaya seperti sistem kekerabatan, nilai-nilai tradisional, serta peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat desa. Bagaimana aspek-aspek ini berinteraksi dengan proses demokrasi modern menjadi dinamika yang unik di tingkat lokal.

Isu-isu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari diskusi tentang politik dan demokrasi. Harapan masyarakat terhadap perbaikan kualitas hidup melalui proses politik demokratis menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Sejauh mana masyarakat melihat korelasi antara partisipasi politik mereka dengan peningkatan kesejahteraan menjadi pertanyaan yang relevan.

Studi tentang persepsi masyarakat terhadap politik dan demokrasi di Desa Beringin ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih komprehensif tentang dinamika politik di tingkat akar rumput. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada diskursus akademik tentang demokrasi desa dan partisipasi politik masyarakat lokal. Dengan mengambil Desa Beringin sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang implementasi demokrasi di tingkat mikro, yang pada gilirannya dapat memperkaya pemahaman kita tentang demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Suharyanto melakukan penelitian berjudul "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan" pada tahun 2014. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor pendidikan, ekonomi, dan integrasi sosial mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Medan. Namun, penelitian ini terbatas pada satu kelompok etnis di wilayah perkotaan.

Nurhasim dalam penelitiannya "Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan" yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa faktor sosialisasi, akses informasi, dan kinerja penyelenggara pemilu berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Studi ini berfokus pada partisipasi dalam bentuk pemberian suara, namun kurang mengeksplorasi bentuk partisipasi politik lainnya.

Aspinall dan Berenschot dalam buku "Democracy for Sale: Elections, Clientelism,



and the State in Indonesia" yang diterbitkan pada tahun 2019 menganalisis dinamika politik uang dan klientelisme dalam pemilu di Indonesia. Meski komprehensif, studi ini lebih banyak mengambil data dari tingkat kabupaten dan provinsi, kurang menyentuh dinamika di tingkat desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi: fokus geografis: Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada wilayah perkotaan atau tingkat kabupaten/provinsi. Masih terdapat kelangkaan studi yang mengeksplorasi secara mendalam persepsi dan partisipasi politik masyarakat di tingkat desa, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Cakupan partisipasi: Banyak penelitian cenderung membatasi definisi partisipasi politik pada keikutsertaan dalam pemungutan suara. Masih diperlukan eksplorasi lebih lanjut tentang bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, seperti keterlibatan dalam diskusi politik, kampanye, atau pengawasan pemilu di tingkat desa.

Faktor sosial budaya: Meski beberapa penelitian telah menyinggung faktor sosial ekonomi, masih terdapat kekurangan dalam eksplorasi mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial budaya spesifik di tingkat desa (seperti sistem kekerabatan, nilai-nilai tradisional, peran tokoh adat) berinteraksi dengan persepsi dan perilaku politik masyarakat.

Konteks temporal: Mayoritas penelitian terdahulu dilakukan dalam konteks pemilu sebelumnya. Masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat dalam konteks Pemilu 2024

yang memiliki karakteristik unik sebagai pemilu serentak.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan yang dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi di Indonesia: fokus mikro pada tingkat desa: Penelitian ini akan memberikan gambaran mendalam tentang dinamika politik dan demokrasi di tingkat desa, khususnya di Desa Beringin, Minahasa Selatan. Hal ini akan mengisi kesenjangan pemahaman tentang implementasi demokrasi di tingkat akar rumput.

Eksplorasi komprehensif persepsi politik: Studi ini tidak hanya akan mengkaji partisipasi dalam pemungutan suara, tetapi juga akan menggali secara mendalam persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek politik dan demokrasi, termasuk pemahaman terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap lembaga politik, dan harapan terhadap proses demokratis.

Analisis interaksi faktor sosial budaya lokal dengan proses demokrasi: Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tradisional, sistem kekerabatan, dan peran tokoh masyarakat di Desa Beringin berinteraksi dengan proses demokrasi modern, memberikan perspektif unik tentang akulturasi demokrasi di tingkat lokal.

Kontekstualisasi dalam Pemilu 2024: Dengan berfokus pada persepsi masyarakat menjelang Pemilu 2024, penelitian ini akan memberikan wawasan terkini tentang bagaimana masyarakat desa memandang dan berpartisipasi dalam pemilu serentak yang pertama kali melibatkan pemilihan presiden dan legislatif dalam satu waktu.



Pengembangan model partisipasi politik desa: Berdasarkan temuan penelitian, studi ini berpotensi menghasilkan model konseptual tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi politik masyarakat desa, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan.

Dengan novelty ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang demokrasi di tingkat akar rumput dan membantu dalam perumusan strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks inilah, studi tentang "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi Pemilu Tahun 2024 di Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap berbagai aspek yang membentuk persepsi dan partisipasi masyarakat desa dalam proses demokrasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di tingkat akar rumput.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan penjelasan yang akurat, berdasarkan fakta, dan metodis terhadap peristiwa sosial atau alam (Afrizal, 2014).

Penggunaan prosedur kualitatif (Moleong & Edisi, 2004) berguna karena lebih mudah bila dikaitkan langsung dengan fakta tentang situasi nyata yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, dan pengetahuan yang diperoleh dapat bertambah seiring berjalannya proses penelitian. Metode penelitian kualitatif

digunakan dalam konteks keilmuan dimana peneliti menjadi instrumen utamanya. Menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks (Sugiyono, 2019).

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang krusial dalam penelitian kualitatif, termasuk dalam studi tentang persepsi masyarakat terhadap politik dan demokrasi. Berikut adalah penjelasan tentang metode wawancara yang dapat digunakan dalam konteks penelitian ini:

Penelitian ini akan menggunakan wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama percakapan, sambil tetap mempertahankan fokus pada tujuan penelitian. Pewawancara akan memiliki panduan pertanyaan, namun dapat mengajukan pertanyaan tambahan atau mengubah urutan pertanyaan sesuai dengan alur percakapan.

Informan akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan kriteria seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan peran dalam masyarakat. Hal ini untuk memastikan representasi yang luas dari berbagai kelompok dalam masyarakat Desa Beringin. Tokoh-tokoh kunci seperti kepala desa, tokoh agama, dan aktivis lokal juga akan dilibatkan.

Wawancara akan dilakukan secara tatap



muka di lokasi yang nyaman dan aman bagi informan, seperti rumah mereka atau tempat umum di desa. Setiap wawancara diperkirakan akan berlangsung sekitar 60-90 menit. Dengan izin informan, wawancara akan direkam secara audio untuk memastikan akurasi dalam transkripsi dan analisis.

Metode wawancara ini dirancang untuk memungkinkan eksplorasi mendalam tentang persepsi masyarakat Desa Beringin terhadap politik dan demokrasi. Dengan pendekatan yang fleksibel namun terstruktur, diharapkan dapat mengungkap nuansa dan kompleksitas pandangan masyarakat, serta faktor-faktor sosial budaya yang membentuknya. Hasil dari wawancara ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika politik di tingkat akar rumput dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan..

2. Pengamatan

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang krusial dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang dinamika sosial politik di Desa Beringin. Beberapa aspek observasi yang akan dilakukan meliputi: Observasi partisipan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan politik dan pemilu, seperti pertemuan desa, sosialisasi pemilu, atau diskusi informal warga.

Pengamatan terhadap interaksi sosial dan pola komunikasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu politik dan pemilu. Observasi terhadap infrastruktur dan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di desa, seperti tempat pemungutan suara, kantor pemerintahan desa, atau pusat informasi

pemilu.

Pengamatan terhadap media informasi yang diakses oleh masyarakat desa, termasuk penggunaan media sosial dan penyebaran informasi politik melalui saluran informal. Observasi terhadap simbol-simbol dan artefak visual yang berkaitan dengan politik dan pemilu di ruang publik desa. Proses observasi akan didokumentasikan melalui catatan lapangan yang rinci, foto (dengan izin yang sesuai), dan rekaman audio (jika memungkinkan). Data observasi ini akan diintegrasikan dengan data dari wawancara dan studi literatur untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konteks penelitian.

Kombinasi metode kualitatif, studi literatur, dan observasi ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan nuansa tentang persepsi masyarakat Desa Beringin terhadap politik dan demokrasi dalam konteks Pemilu 2024. Pendekatan multimetode ini memungkinkan triangulasi data, meningkatkan validitas temuan penelitian, dan memberikan basis yang kuat untuk analisis dan interpretasi.

Hasil dan Pembahasan

Presepsi Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi Pemilu Tahun 2024 di Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Persepsi adalah proses di mana individu menginterpretasikan dan mengorganisasi informasi yang diterima melalui panca indera mereka, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Ini mencakup bagaimana seseorang memahami dan memaknai dunia sekitarnya, termasuk objek, orang, situasi, dan pengalaman. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh



berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, budaya, keyakinan, dan kondisi fisik. Ini adalah langkah awal dalam pemahaman dan interaksi manusia dengan lingkungan mereka

Desa Beringin adalah Desa yang berkecamatan di Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, yang memiliki jarak dengan kantor camat ranoyapo sekitar kurang lebih 14 Km atau sekitar 33 menit rute perjalanan sampai didesa beringin. Desa beringin juga merupakan desa yang demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan dan didalamnya masyarakat dapat menerima haknya sebagai masyarakat, baik hak bertempat tinggal, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Terkait dalam pemilu mendatang ini sehingga muncul pertanyaan bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi dan memberikan pendapatnya terhadap politik-politik yang caleg-caleg ini lakukan. Sehingga peneliti berniat untuk melihat dan menganalisis hasil wawancara lapangan yang di survei pada tanggal Wawancara 15 Oktober 2023.

1. Sikap skeptis terhadap janji-janji politik

Masyarakat cenderung skeptis terhadap janji-janji yang disampaikan oleh para calon pejabat. Sikap skeptis ini mungkin terbentuk dari pengalaman masa lalu di mana janji-janji kampanye sering kali tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan politisi, yang bisa berdampak pada partisipasi politik dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu WP sebagai berikut,
“...kita sebagai masyarakat hanya bisa

menerima siapa yang terpilih kedepannya, tentunya apa yang mereka sampaikan itu kita bisa saja percaya dan juga tidak, karna belum tentu juga apa yang mereka janjikan itu terjadi. (Wawancara 15 Oktober 2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan beberapa aspek penting dari persepsi masyarakat terhadap politik dan proses pemilihan pemimpin. Terdapat skeptisisme terhadap janji politik, dengan pernyataan "kita bisa saja percaya dan juga tidak". Hal ini mengindikasikan adanya keraguan terhadap janji-janji yang disampaikan oleh para calon pemimpin.

Persepsi masyarakat yang tercermin dalam hasil wawancara dan observasi ini dapat dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini menekankan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan masing-masing memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan sistem.

Dalam konteks ini, skeptisisme terhadap janji politik menunjukkan adanya mekanisme kontrol informal dalam masyarakat. Ini berfungsi untuk mendorong para pemimpin agar lebih bertanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan yang dijanjikan.

Teori fungsionalisme struktural (Johnson, 1986) membantu menjelaskan bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap politik berkontribusi pada stabilitas dan keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan. Meskipun ada skeptisisme, masyarakat tetap memiliki mekanisme untuk beradaptasi dan menjaga kohesi sosial melalui nilai-nilai religius.

2. Ketergantungan pada keyakinan



religius

Ada kecenderungan untuk mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan dalam hal pemilihan pemimpin. Ini menunjukkan peran penting agama dalam membentuk persepsi politik masyarakat. Pendekatan ini bisa mempengaruhi cara masyarakat mengevaluasi kandidat, tidak hanya berdasarkan program politik, tetapi juga aspek religius atau moral.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu WP sebagai berikut,
“...kita sebagai masyarakat yang beragama juga hanya mengandalkan tuhan supaya tuhan memberikan pemimpin yang mencintai masyarakatnya”. (Wawancara 15 Oktober 2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan aspek penting dari persepsi masyarakat terhadap proses politik dan pemilihan pemimpin. Responden menekankan peran keyakinan agama dalam konteks politik, dengan menyatakan bahwa masyarakat yang beragama "hanya mengandalkan tuhan supaya tuhan memberikan pemimpin yang mencintai masyarakatnya". Pernyataan ini mencerminkan adanya ketergantungan pada aspek religius dalam memandang proses politik dan kepemimpinan.

Berdasarkan observasi di lapangan, terlihat bahwa masyarakat Desa Beringin memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Hal ini tampak dari keberadaan tempat-tempat ibadah yang aktif dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan keagamaan. Diskusi-diskusi informal mengenai politik sering kali diwarnai dengan sentimen keagamaan, dan tokoh-tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik. Simbol-simbol keagamaan juga terlihat menonjol dalam ruang publik, termasuk dalam konteks

kampanye politik.

Untuk membahas fenomena ini, kita dapat menggunakan teori sosiologi agama yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (Doyle et al., 2009). Durkheim melihat agama sebagai fakta sosial yang memiliki fungsi penting dalam masyarakat. Dalam teorinya, Durkheim menekankan bahwa agama berfungsi sebagai perekat sosial dan sumber solidaritas dalam masyarakat.

Dalam konteks hasil wawancara dan observasi ini:

Fungsi Integrasi Sosial: Keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan pemimpin yang baik berfungsi sebagai faktor pemersatu dalam masyarakat. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat yang berbagi keyakinan yang sama.

Penguatan Nilai Kolektif: Harapan akan pemimpin yang "mencintai masyarakatnya" mencerminkan nilai-nilai kolektif yang dipegang oleh masyarakat. Agama, dalam hal ini, memperkuat dan melegitimasi nilai-nilai tersebut.

Mekanisme Coping: Ketergantungan pada Tuhan dalam proses politik dapat dilihat sebagai mekanisme coping kolektif. Ini membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas sistem politik dengan menyandarkan harapan pada kekuatan yang lebih tinggi.

Sakralisasi Politik: Pendekatan religius terhadap politik ini juga bisa dilihat sebagai bentuk sakralisasi ranah politik. Hal ini dapat memberikan dimensi moral dan etis pada proses politik yang seringkali dipandang sekuler.



Teori Durkheim membantu menjelaskan bagaimana agama, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang menyatukan masyarakat dan memberikan makna pada proses politik. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Misalnya, ia mungkin kurang mempertimbangkan potensi konflik yang bisa muncul dari perbedaan interpretasi keagamaan dalam konteks politik.

Lebih lanjut, fenomena ini juga bisa dianalisis menggunakan konsep "civil religion" yang dikembangkan oleh Robert Bellah. Konsep ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai dan simbol-simbol religius dapat terintegrasi ke dalam kehidupan publik dan politik suatu masyarakat, menciptakan semacam "agama sipil" yang memperkuat kohesi sosial dan legitimasi politik.

Kesimpulannya, persepsi masyarakat yang mengandalkan aspek religius dalam proses politik mencerminkan peran penting agama sebagai institusi sosial yang membentuk pandangan dan perilaku politik masyarakat. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di tingkat akar rumput, yang perlu dipahami dalam upaya membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

3. Pengambilan keputusan berdasarkan hati nurani

Responden menekankan pentingnya memilih berdasarkan hati nurani, bukan semata-mata karena janji politik. Ini menunjukkan bahwa faktor emosional dan penilaian pribadi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik masyarakat. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pendidikan politik

yang lebih rasional dan berbasis isu.

Bapak JP mengatakan,
“...kita-kita rakyat kecil ini memilih dorang, tapi kita sendiri akan memilih pilihan hati bapak sendiri bukan karna politik yang bagus atau apa itu bapak akan pilih sesuai hati nurani bapa sendiri”. (Wawancara 15 Oktober 2023).

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan beberapa aspek penting tentang persepsi dan perilaku pemilih di tingkat akar rumput. Responden, yang mengidentifikasi dirinya sebagai "rakyat kecil", menekankan bahwa keputusan memilih akan didasarkan pada "hati nurani" pribadi, bukan semata-mata karena kualitas program politik yang ditawarkan. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran akan otonomi individu dalam proses pemilihan, sekaligus mengindikasikan potensi skeptisisme terhadap retorika politik yang dianggap "bagus".

Berdasarkan observasi di lapangan, terlihat bahwa masyarakat Desa Beringin memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi. Diskusi-diskusi informal mengenai politik sering terjadi di warung-warung kopi, balai desa, atau tempat-tempat berkumpul lainnya. Dalam interaksi tersebut, faktor-faktor seperti kepribadian kandidat, track record, dan hubungan personal dengan masyarakat sering kali menjadi topik pembicaraan yang lebih dominan dibandingkan program politik. Selain itu, tampak adanya pengaruh tokoh-tokoh informal dalam membentuk opini publik.

Untuk membahas fenomena ini, kita dapat menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer (Ritzer, 2014). Teori ini menekankan bahwa individu



bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada situasi dan objek di sekitar mereka, dan makna ini dibentuk melalui interaksi sosial.

Pembentukan Makna: Persepsi responden tentang "politik yang bagus" dan "hati nurani" terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman pribadi. Makna yang dilekatkan pada konsep-konsep ini mempengaruhi keputusan pemilih.

Interpretasi Peran: Identifikasi diri sebagai "rakyat kecil" mencerminkan interpretasi responden terhadap perannya dalam sistem politik. Ini mungkin mempengaruhi bagaimana mereka melihat hubungan mereka dengan para kandidat dan sistem politik secara keseluruhan.

Simbol dalam Interaksi Politik: Istilah "hati nurani" menjadi simbol yang kuat dalam konteks pengambilan keputusan politik. Ini mungkin mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dianggap penting oleh masyarakat.

Negosiasi Makna: Melalui diskusi informal dan interaksi sosial, masyarakat terus-menerus menegosiasikan makna dari berbagai aspek politik, termasuk apa yang dianggap sebagai kriteria pemimpin yang baik.

Teori interaksionisme simbolik membantu menjelaskan bagaimana keputusan politik individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti program politik, tetapi juga oleh interpretasi pribadi yang terbentuk melalui interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam membentuk persepsi dan perilaku politik.

4. Kesadaran akan keterbatasan

implementasi janji politik

Ada pemahaman bahwa tidak semua janji politik dapat diimplementasikan sepenuhnya. Ini menunjukkan tingkat realisme dalam ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pejabat terpilih. Namun, hal ini juga bisa mengarah pada sikap apatis jika terlalu ditekankan.

Ibu MM mengatakan,

"...menurut saya dorang tidak salah juga dalam menyampaikan politik-politik yang mereka sampaikan kepada masyarakat tetapi dalam hal itu yang salah adalah dorang dalam memahami ataupun menyampaikan politik-politik yang sangat luar biasa ataupun yang terlalu banyak sehingga politik-politik yang mereka sampaikan itu tidak dapat dorang jalankan sendiri melainkan hanya".

Wawancara 15 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu MM menunjukkan pemahaman yang nuansir terhadap dinamika politik dan janji-janji kampanye. Responden mengakui bahwa para politisi tidak sepenuhnya salah dalam menyampaikan visi dan misi mereka. Namun, ia mengkritisi kecenderungan para kandidat untuk membuat janji-janji yang terlalu ambisius atau dalam jumlah yang berlebihan. Menurut Ibu MM, masalah utamanya terletak pada ketidakmampuan para politisi untuk mengimplementasikan semua janji tersebut secara mandiri.

Berdasarkan observasi di lapangan, terlihat bahwa masyarakat Desa Beringin cukup aktif mengikuti perkembangan politik, terutama menjelang pemilihan umum. Poster-poster kampanye dan spanduk visi-misi kandidat terlihat di berbagai sudut desa. Diskusi-diskusi informal mengenai janji-janji politik para kandidat sering terjadi di warung-warung



kopi dan tempat-tempat berkumpul warga. Terlihat adanya sikap kritis namun juga realistis di kalangan warga dalam menanggapi janji-janji kampanye.

Untuk menganalisis fenomena ini, kita dapat menggunakan teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang dikembangkan oleh George Homans dan Peter Blau (Mesra, 2021). Teori ini melihat interaksi sosial sebagai suatu bentuk pertukaran yang didasarkan pada perhitungan untung-rugi.

Teori pertukaran sosial membantu menjelaskan bagaimana masyarakat, seperti yang direpresentasikan oleh Ibu MM, membangun ekspektasi dan melakukan evaluasi terhadap proses politik berdasarkan perhitungan rasional, meski terbatas. Ini menunjukkan bahwa pemilih tidak pasif menerima janji-janji politik, melainkan aktif mengevaluasi kredibilitas dan kelayakan janji tersebut.

Lebih lanjut, fenomena ini juga bisa dianalisis menggunakan konsep "political efficacy" atau efikasi politik. Kesadaran akan keterbatasan implementasi janji politik bisa mempengaruhi tingkat efikasi politik internal (keyakinan bahwa seseorang dapat mempengaruhi proses politik) dan eksternal (keyakinan bahwa sistem politik responsif terhadap tuntutan warga).

5. Kesiapan untuk menerima hasil pemilihan

Masyarakat menyatakan kesiapan untuk menerima siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. Sikap ini menunjukkan tingkat penerimaan terhadap proses demokrasi, yang penting untuk stabilitas politik. Namun, perlu diperhatikan agar sikap ini tidak mengarah pada pasivitas dalam mengawasi kinerja

pemerintah.

Ibu MM mengatakan,
"...menurut saya, kita sebagai masyarakat juga hanya dapat menerima siapa yang akan menjadi pemimpin kedepannya dan apapun yang menjadi visi misi dorang juga dalam membangun Indonesia ini ataupun Desa beringin ini itu semua kita serahkan kepada dorang". **Wawancara 15 Oktober 2023.**

Hasil wawancara dengan Ibu MM menunjukkan sikap penerimaan terhadap hasil pemilihan dan proses demokrasi. Responden menyatakan bahwa masyarakat siap menerima siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, beserta visi dan misi yang mereka bawa. Pernyataan "itu semua kita serahkan kepada dorang" mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan tertentu terhadap sistem demokrasi dan para pemimpin terpilih.

Berdasarkan observasi di lapangan, terlihat bahwa masyarakat Desa Beringin cukup aktif dalam proses pemilihan. Tingkat partisipasi dalam pemungutan suara cenderung tinggi, dan diskusi-diskusi politik informal sering terjadi di ruang-ruang publik desa. Namun, pasca pemilihan, ada kecenderungan menurunnya intensitas diskusi dan pengawasan terhadap kinerja pejabat terpilih. Spanduk-spanduk dan atribut kampanye yang sebelumnya marak, segera diganti dengan aktivitas keseharian normal pasca pemilihan.

Untuk menganalisis fenomena ini, kita dapat menggunakan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan.



Teori struktural fungsional membantu menjelaskan bagaimana sikap penerimaan terhadap hasil pemilihan berkontribusi pada stabilitas dan keseimbangan sistem sosial-politik. Namun, teori ini juga menggarisbawahi pentingnya setiap bagian sistem untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Lebih lanjut, fenomena ini juga bisa dianalisis menggunakan konsep "legitimasi politik" yang dikembangkan oleh Max Weber. Penerimaan hasil pemilihan oleh masyarakat memberikan legitimasi kepada pemimpin terpilih, yang penting untuk efektivitas pemerintahan.

6. Kritik terhadap over-promising dalam kampanye

Ada kritik terhadap calon pejabat yang membuat terlalu banyak janji yang sulit direalisasikan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas kritis dalam mengevaluasi janji-janji politik. Hal ini bisa mendorong politisi untuk lebih realistis dalam menyusun program kampanye.

Ibu MM mengatakan,
“...menurut saya dorang tidak salah juga dalam menyampaikan politik-politik yang mereka sampaikan kepada masyarakat tetapi dalam hal itu yang salah adalah dorang dalam memahami ataupun menyampaikan politik-politik yang sangat luar biasa ataupun yang terlalu banyak sehingga politik-politik yang mereka sampaikan itu tidak dapat dorang jalankan sendiri”. (Wawancara 15 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan Ibu MM menunjukkan sikap kritis namun seimbang terhadap janji-janji politik dalam kampanye. Responden mengakui bahwa para politisi

tidak sepenuhnya salah dalam menyampaikan visi dan program mereka. Namun, ia mengkritisi kecenderungan para kandidat untuk membuat janji-janji yang terlalu ambisius ("sangat luar biasa") atau dalam jumlah yang berlebihan. Ibu MM menekankan bahwa masalah utamanya terletak pada ketidakmampuan para politisi untuk mengimplementasikan semua janji tersebut secara mandiri.

Berdasarkan observasi di lapangan, terlihat bahwa masyarakat Desa Beringin cukup aktif mengikuti perkembangan kampanye politik. Poster-poster dan spanduk visi-misi kandidat terlihat di berbagai sudut desa. Diskusi-diskusi informal mengenai janji-janji politik para kandidat sering terjadi di warung-warung kopi dan tempat-tempat berkumpul warga. Terlihat adanya sikap skeptis di kalangan warga, terutama terhadap janji-janji yang dianggap terlalu muluk. Beberapa warga terdengar membandingkan janji kampanye saat ini dengan realisasi janji-janji di periode sebelumnya.

Untuk menganalisis fenomena ini, kita dapat menggunakan teori pilihan rasional (rational choice theory) yang dikembangkan oleh James S. Coleman. Teori ini memandang bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka berdasarkan informasi yang tersedia.

Teori pilihan rasional membantu menjelaskan bagaimana masyarakat, seperti yang direpresentasikan oleh Ibu MM, menggunakan kapasitas kritisnya untuk mengevaluasi janji-janji politik. Ini menunjukkan bahwa pemilih tidak pasif menerima informasi, melainkan aktif memproses dan menilainya berdasarkan rasionalitas dan pengalaman mereka.



Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Beringin memiliki persepsi yang kompleks dan nuansir terhadap politik dan demokrasi dalam konteks Pemilu 2024. Terdapat sikap skeptis terhadap janji-janji politik yang dianggap terlalu ambisius, namun juga ada kesiapan untuk menerima hasil pemilihan sebagai bagian dari proses demokrasi. Masyarakat menunjukkan kapasitas kritis dalam mengevaluasi program kampanye, yang mencerminkan tingkat kecanggihan politik tertentu di tingkat akar rumput. Faktor religius dan nilai-nilai lokal masih memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan perilaku politik. Meskipun ada kecenderungan untuk menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin terpilih, terdapat potensi risiko pasivitas dalam pengawasan kinerja pemerintah. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya strategi yang seimbang dalam pendidikan politik dan penguatan partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam proses pemilihan tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah pasca pemilihan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan membangun hubungan yang lebih dinamis antara politisi dan konstituen di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

Afrizal, M. A. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.

Daniel, Y., Santie, A., Mamonto, F. H., Lasut, M., & Mesra, R. (2023). Penerapan Gaya Kepemimpinan Egaliter Orang Minahasa di Universitas Negeri Manado. 9(1), 549–556. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4696/http>

Doyle, L., Brady, A.-M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods research. *Journal of Research in Nursing, 14*(2), 175–185.

Gugule, H., & Mesra, R. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Kotamobagu. 7(2), 1691–1699. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5008/http>

Gugule, H., Runtu, N. B., Salem, V. E. T., Mesra, R., & Hasrin, A. (2023). The Role of the Village Government in the Development of Tourism Objects as Economic Potential in Sarani Matani Village. *Technium Social Sciences Journal, 49*, 17–23.

Hardinata, D., & Mesra, R. (2024). Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Perikanan di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL), 1*(4), 253–265.

Johnson, D. P. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terjemahan Robert MZ Lawang dari judul asli “. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*.

Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik, 1*(2), 172–182.

Mesra, R. (2021). *Pengantar Sosiologi Umum (menelusuri Kajian-kajian Sosiologi)*. Deepublish Publisher.

Mesra, R. (2023). *Adat, Sejarah Dan Budaya Nusantara*. Akademia Pustaka.

Mesra, R., Werah, A. C., Kasenda, M. A., & Sidayang, S. (2023). *Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa*



Rumoong Atas Dua , Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
7(2), 1030–1039.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4682/>
http

Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.*

Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653.

